

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih menunjukkan angka yang tinggi, khususnya di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep yang secara konsisten berada pada kelompok kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor sosial ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Madura.

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensi yang masih menjadi isu krusial di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan per kapita dan perbaikan struktur ekonomi (Lestari & Nisa, 2024). Fenomena kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja yang memengaruhi distribusi hasil pembangunan (Ifaturrahmi, 2023). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan kerap dijadikan indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah (Mansur, 2024). di mana permasalahannya sangat

dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, serta kualitas sumber daya manusia.

Secara konseptual, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Secara umum, kemiskinan mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendapatan dan sumber daya (H. P. Putra et al., 2021). Kondisi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja yang tercermin dalam tingkat pengangguran terbuka, serta kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui rata-rata lama sekolah. Pada tingkat regional, khususnya di Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, kemiskinan masih menjadi kondisi sosial ekonomi yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan daerah karena berdampak pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari pola pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya merata antarwilayah. Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional, kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun perekonomian Jawa Timur terus tumbuh, manfaat pembangunan tersebut belum terdistribusi secara merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian Masyarakat khususnya yang bekerja di sektor

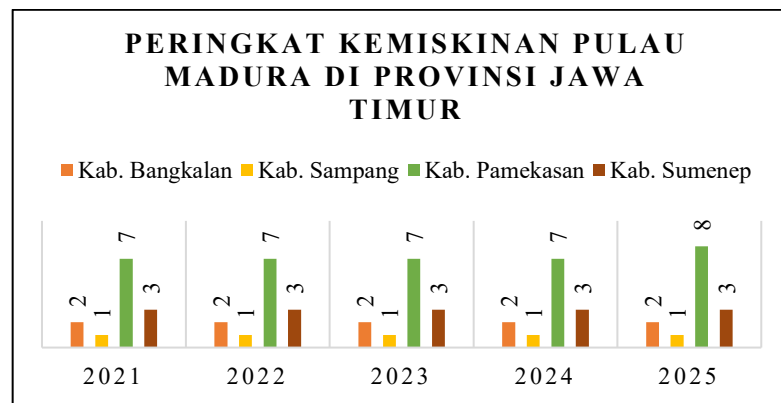
informal dengan pendapatan fluktuatif serta memiliki keterbatasan akses pendidikan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Fenomena kemiskinan ini terlihat pada posisi relatif Pulau Madura dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Untuk membuktikan bahwa Pulau Madura merupakan kawasan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, perkembangan tingkat kemiskinan pada 38 daerah otonom (29 kabupaten dan 9 kota) periode 2021–2025 disajikan pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Peringkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2021–2025

2021		2022		2023		2024		2025	
No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota
1	Sampang	1	Sampang	1	Sampang	1	Sampang	1	Sampang
2	Bangkalan	2	Bangkalan	2	Bangkalan	2	Bangkalan	2	Bangkalan
3	Probolinggo	3	Probolinggo	3	Probolinggo	3	Probolinggo	3	Probolinggo
4	Probolinggo	4	Probolinggo	4	Probolinggo	4	Probolinggo	4	Probolinggo
5	Tuban	5	Tuban	5	Tuban	5	Tuban	5	Tuban
6	Ngawi	6	Ngawi	6	Ngawi	6	Ngawi	6	Ngawi
7	Pamekasan	7	Pamekasan	7	Pamekasan	7	Pamekasan	7	Pamekasan
8	Pacitan	8	Pacitan	8	Pacitan	8	Pacitan	8	Pamekasan
9	Bondowoso	9	Bondowoso	9	Bondowoso	9	Bondowoso	9	Bondowoso
10	Lamongan	10	Lamongan	10	Lamongan	10	Lamongan	10	Lamongan
11	Bojonegoro	11	Bojonegoro	11	Bojonegoro	11	Bojonegoro	11	Bojonegoro
12	Situbondo	12	Situbondo	12	Situbondo	12	Situbondo	12	Situbondo
13	Gresik	13	Gresik	13	Madun	13	Madun	13	Madun
14	Trenggalek	14	Trenggalek	14	Gresik	14	Trenggalek	14	Trenggalek
15	Madun	15	Madun	15	Nganjuk	15	Gresik	15	Nganjuk
16	Nganjuk	16	Nganjuk	16	Kediri	16	Nganjuk	16	Gresik
17	Kediri	17	Kediri	17	Trenggalek	17	Kediri	17	Kediri
18	Magetan	18	Magetan	18	Mojokerto	18	Mojokerto	18	Magetan
19	Mojokerto	19	Mojokerto	19	Magetan	19	Magetan	19	Ponorogo
20	Malang	20	Malang	20	Ponorogo	20	Ponorogo	20	Mojokerto
21	Jember	21	Jember	21	Jember	21	Jember	21	Malang
22	Ponorogo	22	Ponorogo	22	Malang	22	Malang	22	Jember
23	Lumajang	23	Lumajang	23	Pasuruan	23	Lumajang	23	Lumajang
24	Jombang	24	Jombang	24	Jombang	24	Pasuruan	24	Jombang
25	Pasuruan	25	Pasuruan	25	Lumajang	25	Jombang	25	Pasuruan
26	Blitar	26	Blitar	26	Blitar	26	Blitar	26	Blitar
27	Banyuwangi	27	Banyuwangi	27	Banyuwangi	27	Kota Blitar	27	Kota Blitar
28	Kota Blitar	28	Kota Blitar	28	Kota Blitar	28	Banyuwangi	28	Kota Pasuruan
29	Kota Kediri	29	Kota Kediri	29	Kota Kediri	29	Kota Kediri	29	Banyuwangi
30	Tulungagung	30	Tulungagung	30	Kota Pasuruan	30	Kota Pasuruan	30	Kota Kediri
31	Kota Probolinggo	31	Kota Probolinggo	31	Tulungagung	31	Tulungagung	31	Tulungagung
32	Kota Pasuruan	32	Kota Pasuruan	32	Kota Probolinggo	32	Kota Probolinggo	32	Kota Probolinggo
33	Kota Mojokerto	33	Kota Mojokerto	33	Kota Mojokerto	33	Kota Mojokerto	33	Kota Mojokerto
34	Sidoarjo	34	Sidoarjo	34	Sidoarjo	34	Sidoarjo	34	Sidoarjo
35	Kota Surabaya	35	Kota Madun	35	Kota Madun	35	Kota Madun	35	Kota Madun
36	Kota Madun	36	Kota Surabaya	36	Kota Surabaya	36	Kota Surabaya	36	Kota Malang
37	Kota Malang	37	Kota Malang	37	Kota Malang	37	Kota Malang	37	Kota Surabaya
38	Kota Batu	38	Kota Batu	38	Kota Batu	38	Kota Batu	38	Kota Batu



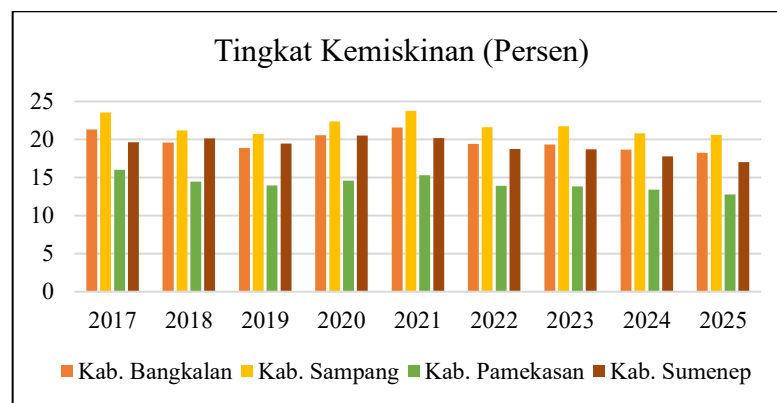
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

Dinamika tingkat kemiskinan di Pulau Madura menunjukkan pergeseran posisi relatif yang cukup mengkhawatirkan jika disandingkan dengan 38 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 9 kota) di Provinsi Jawa Timur. Guna memberikan gambaran spasial yang mutakhir, fokus pengamatan pada penelitian ini diarahkan pada periode 2021–2025. Sepanjang periode pengamatan 2021–2025, Kabupaten Sampang secara konsisten terkunci di peringkat pertama sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, disusul Kabupaten Bangkalan di peringkat kedua, dan Kabupaten Sumenep di peringkat ketiga. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan menyusul di kisaran peringkat ketujuh hingga kedelapan. Fenomena persisten ini menegaskan bahwa seluruh kabupaten di Pulau Madura secara simultan terperangkap dalam kluster kemiskinan struktural tingkat tinggi yang sulit terurai di Provinsi Jawa Timur.

Tertahannya posisi Madura di papan atas kemiskinan Provinsi Jawa Timur memunculkan fenomena paradoks pembangunan (*growth-poverty paradox*) yang sangat krusial. Kehadiran konektivitas infrastruktur yang menghubungkan Madura langsung dengan Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, melimpahnya potensi sumber daya alam (migas, perikanan kepulauan, dan tembakau), serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah ternyata gagal bertranslasi menjadi pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengindikasikan pola yang tidak inklusif (*non-inclusive growth*), di mana kue perekonomian dan aliran investasi modal besar terisolasi pada sektor manufaktur atau ekstraktif padat modal yang minim daya serap terhadap angkatan kerja lokal, sehingga dampaknya tidak pernah menjangkau rumah tangga miskin secara nyata.

Secara tipologi wilayah, meskipun terdapat daerah kepulauan lain di Indonesia yang menghadapi persoalan kemiskinan (seperti Pulau Nias dan Pulau Sumba), fenomena kemiskinan di Pulau Madura memiliki keunikan dan urgensi empiris yang jauh lebih kritis. Madura merupakan kawasan kepulauan yang secara geografis menempel langsung pada koridor manufaktur utama Pulau Jawa, namun seluruh wilayah kabupatennya secara agregat justru mendominasi jajaran daerah termiskin di Jawa Timur. Konsentrasi kemiskinan yang ekstrem secara spasial ini mengindikasikan hadirnya jebakan kemiskinan daerah (*regional poverty trap*) yang kuat. Oleh karena itu, keterikatan fenomena ketimpangan yang persisten ini menuntut adanya evaluasi empiris mendalam untuk membongkar sejauh mana interaksi simultan antara laju pertumbuhan ekonomi, kapasitas serap pasar kerja, dan stok modal manusia memengaruhi dinamika kemiskinan di Pulau Madura.

Gambar 1.2 Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan 4 Kabupaten di Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

Gambar 1.2 menunjukkan gambaran perkembangan tingkat kemiskinan periode 2017-2025. dinamika kemiskinan di Pulau Madura menunjukkan tren perbaikan yang positif dan berkelanjutan, meskipun bergerak secara fluktuatif

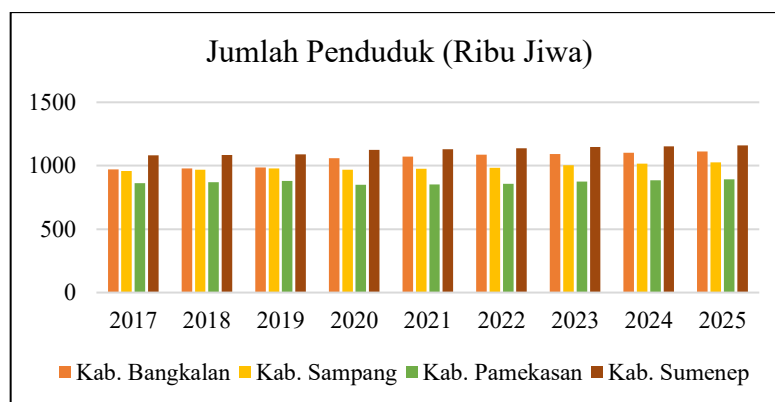
selama periode 2017–2025. Perkembangan ini mencerminkan tingginya sensitivitas kondisi socio-ekonomi masyarakat lokal terhadap perubahan kondisi perekonomian makro. Di antara empat wilayah yang diamati, Kabupaten Sampang secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi dimulai dari 23,56 persen pada tahun 2017 hingga berada di angka 20,61 persen pada tahun 2025. Sebaliknya, Kabupaten Pamekasan secara beruntun menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni bergerak dari 16,00 persen pada tahun 2017 hingga menyusut menjadi 12,77 persen di akhir periode pengamatan. Sementara itu, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep mencatatkan pola penurunan yang searah, masing-masing melandaikan angka kemiskinannya menjadi 18,25 persen dan 17,02 persen pada tahun 2025.

Selain itu, sejumlah studi mengindikasikan bahwa pergeseran angka kemiskinan daerah sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal (seperti krisis kesehatan global), keterbatasan penyerapan pasar kerja formal, kerentanan pendapatan rumah tangga di sektor informal, serta variasi akses terhadap layanan pendidikan dan infrastruktur (Ardina, 2024; Ashari & Athoillah, 2023; Rukmana & Imaningsih, 2023). Hal ini terlihat jelas pada rentang tahun 2020–2021, di mana dampak pandemi COVID-19 menekan perekonomian daerah dan memicu lonjakan angka kemiskinan di seluruh kabupaten. Kabupaten Sampang mengalami kenaikan hingga menyentuh puncak 23,76 persen pada tahun 2021, diikuti Kabupaten Bangkalan (21,57 persen), Kabupaten Sumenep (20,18 persen), dan Kabupaten Pamekasan (15,30 persen). Meskipun tren pemulihan pascapandemi mulai terlihat sejak tahun 2022, ketimpangan struktur ekonomi lokal sempat kembali menaikkan

persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang menjadi 21,76 persen pada tahun 2023, di saat kabupaten lainnya terus menunjukkan perbaikan.

Secara geografis dan kultural, Pulau Madura memiliki karakteristik pasar tenaga kerja dan sosial-masyarakat yang unik, seperti dominasi sektor pertanian lahan kering, tingginya angka pekerja musiman, budaya merantau (*toron*), serta kuatnya peran lembaga pendidikan nonformal. Rentetan kondisi struktural ini menjadikan Pulau Madura sebagai wilayah kajian yang sangat strategis dalam memahami efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis modal manusia dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada empat kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dengan menggunakan rentang data pembaharuan hingga tahun 2025. Langkah ini sangat krusial untuk memvalidasi kembali apakah pola penurunan kemiskinan sebelum masa krisis masih berlaku atau telah mengalami pemulihan struktural pascapandemi, sehingga mampu memberikan gambaran yang presisi sebagai pijakan formulasi kebijakan daerah.

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Penduduk 4 Kabupaten di Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2025



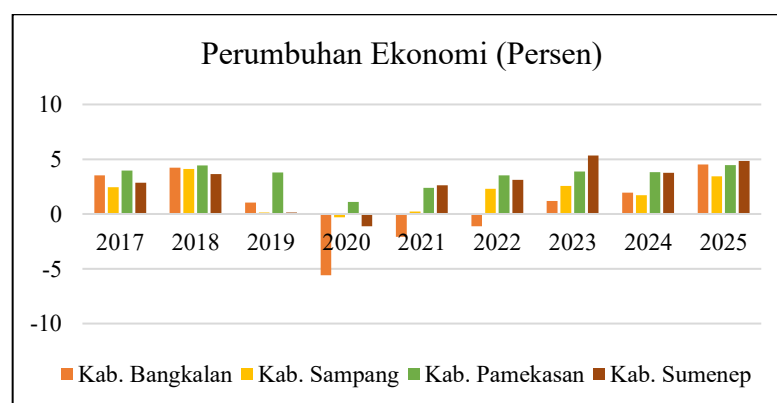
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

Gambar 1.3 menunjukkan gambaran perkembangan jumlah penduduk di Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep selama periode 2017-2025. perkembangan jumlah penduduk di empat kabupaten Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan dinamis selama periode 2017–2025. Kabupaten Bangkalan mencatatkan peningkatan dari 970,8 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 1.112,9 ribu jiwa pada tahun 2025, diikuti Kabupaten Sampang yang meningkat dari 958,0 ribu jiwa menjadi 1.027,5 ribu jiwa, serta Kabupaten Sumenep yang tumbuh dari 1.081,2 ribu jiwa menjadi 1.159,3 ribu jiwa. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan menunjukkan pola yang sedikit fluktuatif, di mana jumlah penduduk sempat melandaik pada tahun 2020 menjadi 850,1 ribu jiwa sebelum kembali merambat naik hingga mencapai 893,3 ribu jiwa pada tahun 2025.

Secara umum, distribusi kependudukan di Pulau Madura tersebar tidak merata, dengan Kabupaten Sumenep secara konsisten mendominasi sebagai

wilayah berpenduduk terbesar dan Kabupaten Pamekasan mencatatkan jumlah penduduk paling sedikit. Variasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, tingkat fertilitas, mortality, serta mobilitas penduduk di tiap daerah. Pertumbuhan demografi yang pesat ini dapat menjadi modalitas pembangunan apabila diimbangi oleh peningkatan produktivitas, perluasan pasar kerja, dan kualitas modal manusia (*human capital*). Sebaliknya, pesatnya laju kependudukan yang tidak diimbangi dengan kapasitas penyerapan sektor industri maupun kualitas pendidikan berpotensi memperketat tekanan pasar tenaga kerja dan memperluas kerentanan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proporsi demografi daerah, perbandingan antara total populasi dan jumlah angkatan kerja di masing-masing kabupaten disajikan pada gambar berikutnya.

Gambar 1.4 Grafik Persentase Pertumbuhan Ekonomi 4 Kabupaten di Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

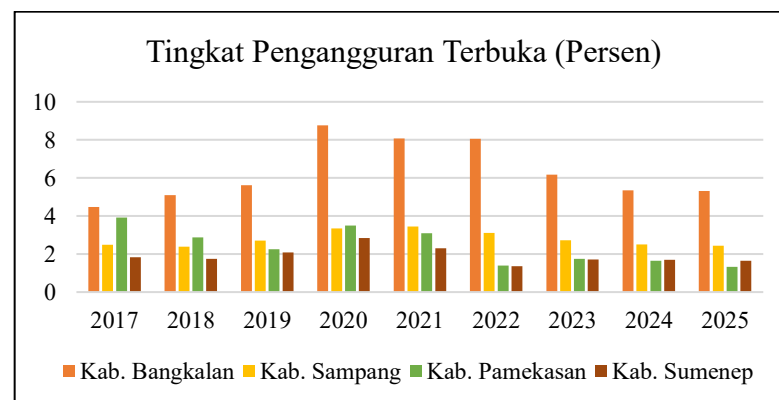
Gambar 1.4 menunjukkan gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) menunjukkan tren yang fluktuatif dan dinamis selama periode 2017–

2025. Perubahan ini mencerminkan tingginya sensitivitas aktivitas ekonomi daerah terhadap pergeseran kondisi makroekonomi serta guncangan eksternal. Pada rentang 2017–2019, kinerja perekonomian bergerak bervariasi; Kabupaten Bangkalan sempat menguat dari 3,53 persen pada tahun 2017 menjadi 4,22 persen pada 2018 sebelum melambat ke 1,03 persen pada 2019. Pola serupa terjadi di Kabupaten Sampang yang naik dari 2,44 persen menjadi 4,11 persen lalu melandaik ke 0,14 persen, serta Kabupaten Sumenep yang tumbuh dari 2,86 persen menjadi 3,63 persen kemudian melambat ke 0,14 persen. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan mencatatkan kinerja yang lebih stabil di kisaran 3,97 persen hingga 4,43 persen sebelum sedikit menyusut ke 3,79 persen pada 2019.

Selain itu, sejumlah studi mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kelancaran aktivitas sektor riil, daya beli masyarakat, tingkat pendidikan modal manusia, serta penyerapan tenaga kerja di pasar kerja (Faritz & Soejoto, 2020; Mansi et al., 2020; Ngubane et al., 2023; Novitasari & Imaningsih, 2024; Sari et al., 2021). Hal ini terlihat jelas pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 menekan perekonomian daerah hingga menyebabkan Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep mengalami kontraksi pertumbuhan, sedangkan Kabupaten Pamekasan masih mampu bertahan di zona positif. Memasuki periode pemulihan 2021–2025, aktivitas ekonomi di seluruh kabupaten bangkit secara bertahap. Pada tahun 2025, seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, dengan Kabupaten Sumenep memimpin laju pertumbuhan tertinggi, disusul Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang.

Secara geografis dan struktural, perekonomian Pulau Madura memiliki karakteristik yang unik dengan ketergantungan pada sektor pertanian lahan kering, perdagangan skala mikro, perikanan, serta sektor jasa informal. Kondisi ini membuat struktur PDRB daerah sangat rentan terhadap dinamika harga komoditas utama dan perubahan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada empat kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dengan menggunakan rentang data terbaru hingga tahun 2025. Langkah ini sangat krusial untuk memvalidasi kembali stabilitas pemulihan ekonomi pascapandemi serta mengevaluasi sejauh mana akselerasi pertumbuhan ekonomi mampu mendorong penguatan modal manusia dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Pulau Madura.

Gambar 1.5 Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kabupaten di Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

Gambar 1.5 menunjukkan gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di empat kabupaten Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) menunjukkan tren yang fluktuatif dan dinamis selama periode 2017–2025. Perubahan ini mencerminkan tingginya sensitivitas kondisi pasar tenaga kerja

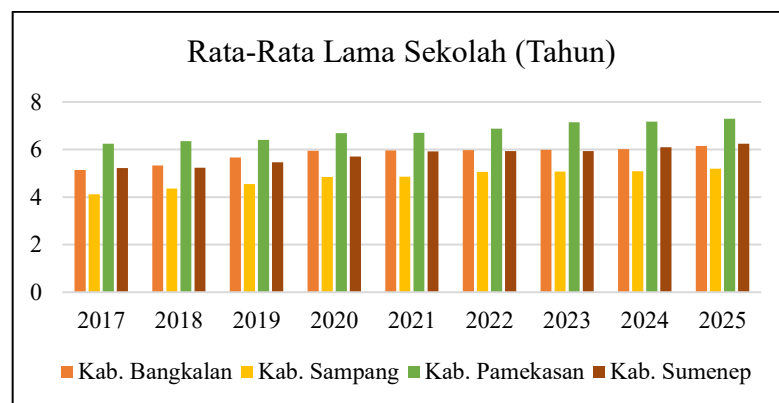
daerah terhadap daya serap sektor usaha serta guncangan eksternal. Pada rentang 2017–2019, dinamika ketenagakerjaan bergerak bervariasi; Kabupaten Bangkalan mencatatkan tren kenaikan dari 4,48 persen pada tahun 2017 menjadi 5,62 persen pada 2019. Pola fluktuatif melandaik terjadi di Kabupaten Sampang yang bergerak dari 2,48 persen ke 2,38 persen sebelum naik ke 2,71 persen pada 2019, serta Kabupaten Sumenep yang berada pada kisaran 1,75–2,08 persen. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan berhasil menekan angka pengangguran dari 3,91 persen pada 2017 menjadi 2,26 persen pada 2019.

Selain itu, sejumlah studi mengindikasikan bahwa pergeseran tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh stabilitas aktivitas sektor riil, keterbatasan kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal, tingkat pendidikan angkatan kerja, serta guncangan ekonomi makro (Fayza et al., 2025; Mansi et al., 2020; Monica & Susilowati, 2024; Ngubane et al., 2023; Wisanggeni et al., 2024). Hal ini terlihat jelas pada rentang 2020–2021, di mana pandemi COVID-19 menekan aktivitas perekonomian daerah, mempersempit kesempatan kerja, dan memicu peningkatan TPT di seluruh kabupaten di Pulau Madura. Memasuki periode pemulihan 2022–2025, pemulihan sektor usaha secara bertahap berhasil mendorong penurunan pengangguran secara merata. Pada tahun 2025, Kabupaten Bangkalan mencatatkan TPT tertinggi sebesar 5,31 persen, disusul Kabupaten Sampang (2,44 persen), Kabupaten Sumenep (1,64 persen), dan Kabupaten Pamekasan menjadi wilayah dengan TPT terendah sebesar 1,33 persen.

Secara geografis dan kultural, struktur ketenagakerjaan di Pulau Madura didominasi oleh pekerja di sektor informal, pertanian lahan kering, serta tradisi mobilitas tenaga kerja (*merantau*). Kondisi ini menyebabkan indikator

pengangguran terbuka rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan pergeseran musim kerja. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada empat kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dengan menggunakan rentang data pembaharuan hingga tahun 2025. Langkah ini sangat krusial untuk memvalidasi kembali pola pemulihan pasar tenaga kerja pascapandemi serta mengevaluasi sejauh mana daya serap kesempatan kerja mampu mendukung penguatan modal manusia dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Pulau Madura.

Gambar 1.6 Grafik Persentase Rata-Rata Lama Sekolah 4 Kabupaten di Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2026)

Gambar 1.6 menunjukkan gambaran perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di empat kabupaten Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan konsisten selama periode 2017–2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akumulasi pendidikan formal angkatan kerja serta penguatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pada awal periode pengamatan tahun 2017, Kabupaten Pamekasan telah mencatatkan RLS tertinggi sebesar 6,25 tahun, diikuti

Kabupaten Sumenep (5,22 tahun), Kabupaten Bangkalan (5,14 tahun), dan Kabupaten Sampang sebagai wilayah dengan RLS terendah sebesar 4,12 tahun. Selama periode 2017–2025, capaian RLS di seluruh kabupaten terus merambat naik secara berkelanjutan hingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,29 tahun di Kabupaten Pamekasan, 6,24 tahun di Kabupaten Sumenep, 6,15 tahun di Kabupaten Bangkalan, dan 5,19 tahun di Kabupaten Sampang.

Selain itu, sejumlah studi mengindikasikan bahwa peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh krusial terhadap penguatan kualitas modal manusia, peningkatan produktivitas kerja, perluasan akses kesempatan kerja formal, serta penekanan angka kemiskinan daerah (Adhim et al., 2024; Fayza et al., 2025; Mansi et al., 2020; Novitasari & Imaningsih, 2024; Wisanggeni et al., 2024). Hal ini terlihat sepanjang rentang 2020–2025, di mana meskipun perekonomian sempat diguncang pandemi COVID-19, indikator RLS di seluruh kabupaten di Pulau Madura tetap mampu melanjutkan tren pertumbuhan positif. Kendati demikian, ketimpangan capaian RLS antarwilayah masih terlihat jelas, di mana Kabupaten Pamekasan secara konsisten memimpin capaian pendidikan tertinggi, sementara Kabupaten Sampang tetap berada di posisi terendah dengan capaian yang baru menembus angka 5 tahun (setara tingkat pendidikan dasar/SD).

Secara geografis dan sosial-budaya, peningkatan RLS di Pulau Madura masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti maraknya fenomena pernikahan usia dini, tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, keberadaan lembaga pendidikan nonformal (pesantren) yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam perhitungan statistik formal, serta keterbatasan sarana pendidikan di kawasan kepulauan terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini

difokuskan pada empat kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dengan menggunakan rentang data pembaharuan hingga tahun 2025. Langkah ini sangat krusial untuk mengevaluasi efektivitas alokasi modal manusia (*human capital*) dalam melepaskan masyarakat dari jebakan modal manusia (*human capital trap*) serta mendorong penurunan kemiskinan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika perekonomian daerah, empat kabupaten di Pulau Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep terus berupaya memperkuat kapasitas modal manusia dan daya dorong sektor riil sebagai sarana utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memutus rantai kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai program kewajiban sosial pemerintah, melainkan juga sebagai prasyarat utama pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi antara akselerasi perekonomian daerah, peningkatan penyerapan pasar kerja, serta perbaikan kualitas pendidikan formal angkatan kerja dalam memicu penurunan persentase penduduk miskin secara masif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pergeseran angka kemiskinan dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, tingkat kesempatan kerja, serta investasi modal manusia. Dari perspektif pendidikan, (Wisanggeni et al., 2024), (Novitasari & Imaningsih, 2024), serta (Nadya & Dwi S, 2025) mengemukakan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Namun, (Adhim et al., 2024) justru menemukan bahwa RLS berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Madura, yang mengindikasikan fenomena *skill mismatch* serta keterbatasan daya serap pasar kerja formal.

Selain pendidikan, stabilitas ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi turut menjadi determinan penting. (Nadya & Dwi S, 2025) membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan akibat penurunan pendapatan rumah tangga, sedangkan (Wisanggeni et al., 2024) menemukan pengangguran tidak berpengaruh signifikan karena tingginya penyerapan sektor informal. Sementara dari sisi makro, (Nada & Dwi S, 2021) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Madura, berbeda dengan temuan (Wisanggeni et al., 2024) yang menilai pertumbuhan ekonomi tidak signifikan apabila belum bersifat inklusif (*inclusive growth*). Variasi temuan ini menegaskan bahwa interaksi antarindikator makroekonomi belum berdampak konsisten terhadap penurunan kemiskinan daerah.

Meskipun demikian, terdapat celah (*gap*) penelitian dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah secara parsial, terpisah, atau lebih banyak berfokus pada agregat Provinsi Jawa Timur secara umum tanpa membedah dinamika struktural kawasan khusus seperti Pulau Madura.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek penting. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan secara simultan tiga determinan utama makroekonomi dan modal manusia, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dalam satu kerangka regresi untuk menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Pendekatan terintegrasi ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti salah satu faktor secara terpisah.

Kedua, penelitian ini memanfaatkan pembaruan rentang data (*up-to-date analysis*) periode 2017–2025 yang mencakup fase sebelum, saat terjadi pandemi COVID-19 (2020–2021), hingga periode pemulihan ekonomi pascapandemi (2022–2025). Cakupan temporal ini sangat krusial untuk memvalidasi kembali apakah pola hubungan antarvariabel sebelum masa krisis masih berlaku atau telah terjadi perubahan struktural dalam perekonomian.

Ketiga, penelitian ini menerapkan analisis regresi data panel dengan memfokuskan lokus kajian secara khusus pada empat kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) yang secara historis dan empiris konsisten berada pada jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan metodologis ini mampu memotret dinamika *growth-poverty paradox*, karakteristik pasar kerja lokal, serta fenomena *Poverty Trap* di tingkat kabupaten secara lebih presisi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan guna memberikan pemahaman empiris yang lebih mendalam dengan judul: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten se-Pulau Madura Periode 2017–2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025?
- b. Apakah tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025?
- c. Apakah rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai faktor-faktor tingkat kemiskinan di Pulau Madura adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025.
- b. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025.
- c. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura selama periode 2017-2025.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dikaji, maka diperlukan batasan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada determinasi tingkat kemiskinan di Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai variabel independen, serta tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen.
- b. Wilayah penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Keempat kabupaten tersebut dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif serupa serta secara konsisten menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur, sehingga relevan untuk dianalisis dalam kajian tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan data panel.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), dengan periode pengamatan selama tahun 2017-2025, sesuai dengan ketersediaan data dan relevansi terhadap tujuan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah.
- b. Bagi pengambil kebijakan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Pulau Madura serta instansi terkait dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, terutama yang berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan.